



Buletin Parlementaria

Nomor 1130/III/XI/2020 • November 2020

10 NOVEMBER 2020

Semangat Pahlawan Harus Jadi Inspirasi Anak Bangsa



9 772614 339005



3 Azis Syamsuddin Dukung Digitalisasi Data dan Program E-Parlemen



18 Implementasi UU Cipta Kerja Diharapkan Beri Kemudahan Berusaha

Semangat Pahlawan Harus Jadi Inspirasi Anak Bangsa

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan Tanah Air. Semangat juang para pahlawan mesti menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa untuk terus mengupayakan kemajuan Bangsa Indonesia.

Puan mengungkapkan hal tersebut saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di atas KRI di perairan Teluk Jakarta, Selasa (10/11). Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan Bangsa Indonesia. Upacara dan tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dilakukan sekitar pukul 08.00, atau bersamaan waktunya

dengan upacara tabur bunga yang dipimpin Presiden Joko Widodo di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

Puan menyampaikan, usai masa perjuangan kemerdekaan, sosok-sosok pahlawan juga terus muncul dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Menurut Puan, para pembawa perubahan yang memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor kehidupan itu layak diberi gelar pahlawan. “Termasuk para tenaga medis, peneliti, dan akademisi yang terus berjuang dalam menghadapi pandemi Covid -19,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, lanjut Puan, masyarakat yang disiplin menerapkan gerakan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) juga telah menjadi

pahlawan bagi sesama karena telah berjuang menekan penularan Covid-19. Sama halnya masyarakat yang bergotong royong meringankan beban sesama yang terdampak pandemi Covid-19 juga layak disebut pahlawan kemanusiaan karena berkontribusi dalam menyelamatkan kehidupan.

“Mari menjadi pahlawan bagi sesama, bagi masyarakat, dan Tanah Air kita tercinta dengan berkarya dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ungkap cucu Bung Karno tersebut. Tema peringatan Hari Pahlawan tahun ini adalah “Pahlawanku Sepanjang Masa” yang dimaksudkan untuk terus mengingat dan meneladani jasa pahlawan bagi Bangsa Indonesia. ■ sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menabur bunga usai upacara peringatan Hari Pahlawan di atas KRI di perairan Teluk Jakarta. Foto: Kresno/OD

Azis Syamsuddin Dukung Digitalisasi Data dan Program E-Parlemen

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya program e-parlemen sebagai salah satu inovasi Kesetjengan DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Layanan digitalisasi data dan informasi tersebut dinilai dapat mempercepat pelaksanaan kinerja Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti kemudahan akses agenda kerja dan berbagai informasi yang dibutuhkan.

Dikatakan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, program e-parlemen pertama kali mulai diterapkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). Menurutnya, langkah tersebut harus terus didukung

“Parlemen kita sudah menerapkan e-parlemen, dimana semua dokumentasi dan dokumen pendukung sudah menggunakan IT (information technology) yang dibuat untuk memaksimalkan digitalisasi, dimana seluruh kerja DPR akan menjadi lebih cepat, efisien dan ekonomis yang bisa diterapkan seterusnya,” kata Azis saat ditemui *Parlementaria* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, konsep e-parlemen sebagai wujud akuntabilitas DPR RI kepada rakyat dengan mendukung seluruh kinerja Anggota Dewan agar lebih cepat, mudah dan akurat karena secara bertahap akan mengutamakan digitalisasi, sekaligus mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan sehari-hari.

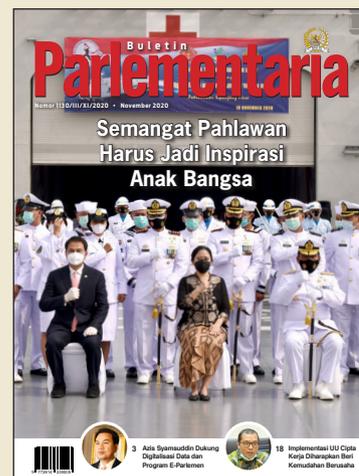
E-parlemen merupakan model pengembangan teknologi informasi yang menyediakan data dan informasi bahan



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.
Foto: Naefuroji/OD

rapat secara digital dan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Selain menjanjikan terwujudnya keterbukaan informasi, e-parlemen juga merupakan bentuk upaya efisiensi penggunaan kertas dengan gagasan *paperless office*.

Azis menambahkan, dirinya berharap pengembangan e-parlemen terus dilakukan, baik dalam hal kecepatan akses dan kelengkapan fitur. “Ini merupakan komitmen seluruh Pimpinan dan Anggota DPR juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mitra kerja, sehingga mekanisme ini dilakukan terus menerus untuk mencapai titik yang bisa akomodasi semua kepentingan mitra kerja dan masyarakat secara umum dan internal melakukan efisiensi di lingkungan internal birokrasi yang ada di Setjen DPR RI,” tandasnya. ■ ann/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiyah, Riyhan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Supian, S.E., Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salimah

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mudiantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E., Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Persaingan Global Tuntut Semua Bekerja Lebih Baik



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima perwakilan serikat pekerja. Foto: Naefuroj/OD

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjelaskan, dalam persaingan global saat ini, semua pihak dituntut untuk bekerja lebih baik. Dia menyarankan agar para pekerja tidak lupa mencurahkan perhatiannya pada hak atas pendidikan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan dari serikat pekerja dari beberapa kalangan ada dari pekerja elektronik, migas, tambang, dan tekstil.

“Mestinya bapak-bapak (pekerja) minta pendidikan, saya belum mendengar tuntutan pendidikan dari kawan-kawan serikat pekerja untuk menaikkan *skill*. Kalau sudah meningkatkan *skill*, secara otomatis gaji akan naik, itu sudah pasti dan *enggak* mungkin *enggak* naik (gaji),” papar Gobel di Ruang KK 1, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan, saat ini persaingan

global telah menuntut mana yang lebih baik. Jika ada pekerja asing memiliki *skill* lebih, maka itu ancaman bagi pekerja lokal. “Saya *enggak* mendengar bagaimana tuntutan untuk pendidikan, kalau pelatihan itu prosesnya. Untuk menjadi karyawan harus dilatih dulu, karena harus mengubah *mindset* bekerja,” ungkap Gobel lebih lanjut.

Dia pun mendengarkan keluhan dan tuntutan dari para pekerja tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurutnya UU tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pekerja. “Kegagalan dari kawan-kawan, saya pahami. Saya sudah bahas masukan ini perlu dipertimbangkan dan kita akan pelajari lebih detail lagi. Yang jelas UU Ciptaker ini tidak untuk merugikan kepentingan karyawan dan para pekerja semua,” terang Gobel.

Politisi dapil Gorontalo ini mengaku selalu mengikuti diskusi-diskusi yang

membahas tentang kepentingan para pekerja. Waktu dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tak jarang dalam mengambil kebijakan selalu mementingkan nasib para pekerja. Dia selalu berupaya untuk mencari manfaat nilai tambah untuk bangsa dan untuk rakyatnya.

“Waktu saya menjabat Menteri Perdagangan, impor pakaian dan barang bekas saya lawan. Tapi tidak ada serikat pekerja bantu saya. Kerena industri tekstil, garmen bisa hancur pada waktu itu. Ketika elektronika diserang impor dari luar, tidak ada para pekerja di bidang elektronik dalam negeri yang bantu,” ujar Gobel.

Politisi Partai NasDem ini mengapresiasi banyak masukan dari para pekerja, masukan tersebut sangat berguna untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja. Jika ada kekurangan dari undang-undang tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. ■eko/es

Dianugerahi Bintang Mahaputera, Puan: Amanah Pengabdian untuk Masyarakat

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana oleh Presiden Joko Widodo. Puan menyatakan, anugerah tanda kehormatan itu jadi penambah semangat yang memacu pengabdian untuk bangsa dan negara.

“Ini amanah yang harus saya sikapi dengan makin bersemangat mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Puan usai upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/10).

Menurut Puan, penganugerahan tanda kehormatan ini juga menjadi suntikan moral dalam memimpin DPR RI. Ia pun berterima kasih atas kepercayaan Presiden Joko Widodo yang menganugerahinya tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

“Sehingga hal ini membuat saya makin teguh memimpin DPR RI dengan semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Penyematan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dilakukan Presiden Joko Widodo dalam prosesi acara yang berlangsung khidmat dan mematuhi protokol kesehatan. Seluruh penerima tanda kehormatan wajib membawa surat keterangan hasil *swab test* dan mengenakan masker serta *face shield*.

Seusai acara, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi ucapan selamat pada penerima tanda kehormatan. Dalam momen itu, Puan menjadi penerima tanda kehormatan yang paling pertama menerima ucapan selamat dari Jokowi-Ma'ruf.

”

INI AMANAH YANG HARUS SAYA SIKAPI DENGAN MAKIN BERSEMANGAT MENGABDI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

Puan yang saat ini menjabat Ketua DPR RI menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana atas jasa-jasanya sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019. Adapun Puan juga merupakan menteri koordinator termuda sepanjang sejarah kabinet pemerintahan Republik Indonesia.

Saat menjadi Menko PMK, sesuai tugas yang menjadi ruang lingkupnya, Puan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia, sukses dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sehingga untuk pertama kalinya IPM Indonesia masuk kategori tinggi. Puan juga mendapat rekor MURI (Museum Rekor Dunia-Indonesia) sebagai perempuan pertama sekaligus termuda yang menjadi Menko.

Syarat khusus penerima anugerah Bintang Mahaputera adalah berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Gerald/OD

pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, Pemberiannya dapat dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain Puan, tanda kehormatan juga diberikan kepada beberapa tokoh, di antaranya adalah Tjahjo Kumolo, Susi Pudjiastuti, Khofifah Indar Parawansah, Yasonna Laoly, Retno L.P Marsudi. ■ er/sf

Hari Pahlawan Momentum Perkuat Gotong Royong

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan semangat gotong royong khususnya untuk memutus dan menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan.

“Peringatan Hari Pahlawan di masa pandemi Covid-19 menjadi sebuah semangat dan tekad kita untuk selalu bergotong royong dan meneruskan jasa-jasa para pahlawan dengan kerja nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Azis usai menghadiri acara tabur bunga di Teluk Jakarta untuk memperingati Hari Pahlawan 10

November bersama Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Selasa (10/11).

Azis mengatakan peringatan Hari Pahlawan tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, karena saat ini, Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Azis, jasa pahlawan harus selalu dikenang sepanjang masa, dan generasi penerus Bangsa Indonesia dapat terus memperjuangkan cita-cita para pahlawan yang telah gugur.

“Di masa pandemi ini, kita wajib menjaga protokol kesehatan. Menjadi pahlawan dengan saling melindungi, melindungi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut.

Azis menjelaskan, semangat juang

para pahlawan harus dapat menjadi momentum untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan lebih baik dengan selalu menjaga kesatuan dan persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat harus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan selalu menjunjung serta menghargai jasa para pahlawan.

“Saya optimis Indonesia yang kita cintai dapat menjadi sebuah negara yang maju. Ini impian kita semua, mari kita wujudkan cita-cita para pahlawan bangsa dan meneruskan jasa para pahlawan dengan kerja dan terus berupaya menyejahterakan rakyat,” tukas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menutup pernyataannya. ■ er/sf



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menghadiri acara tabur bunga dan upacara Peringatan Hari Pahlawan di Teluk Jakarta. Foto: Kresno/OD

Panja RUU PDP Berhasil Rampungkan Pembahasan 12 DIM



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin rapat Panja PDP. Foto: Naefuraji/OD

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP.

Pada rapat kali ini, Tim Panja RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR dan Tim Panja dari Pemerintah telah merampungkan pembahasannya hingga DIM ke 12. “Kita sudah berhasil menyelesaikan

12 DIM. Selanjutnya hari Rabu pekan depan kita akan membahas lagi (DIM selanjutnya),” ucap Kharis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Legislator Fraksi PKS ini berharap, pada rapat-rapat Panja RUU PDP selanjutnya akan bisa lebih banyak lagi DIM yang dapat diselesaikan pembahasannya secara baik. RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi suatu regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatur data pribadi, baik didalam negeri maupun lintas batas negara.

RUU PDP juga akan memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan

pertahanan negara, serta perlindungan data pribadi milik warga negara Indonesia di manapun data pribadi tersebut berada.

Perlindungan data pribadi sendiri ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu perlu adanya landasan hukum yang mengatur perlindungan untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

■ dep/es

Anggota DPR Dukung Jokowi Tingkatkan Kerja Sama dengan AS

Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus mengapresiasi niatan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam bidang ekonomi, demokrasi dan multilateral, pasca kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020.

“Saya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi jika memang beliau menyampaikan itu. Saya mendukung ada upaya yang lebih konkret membangun kerja sama di bidang-bidang tersebut, termasuk mengenai sistem Pemilu kita,” kata Gusparda kepada *Parlementaria*, Senin (9/11).

Politisi Fraksi PAN ini menilai, kemenangan Biden memang patut menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam demokrasi dan demokratisasi. Biden telah menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang akomodatif di tengah aspirasi pemilih AS yang multietnis, agama, dan teritori (negara bagian).

“Ini tentu nilai demokratis yang patut dicatat. Tak heran lebih kurang 80 persen suara pemilih muslim Amerika mendukung Biden. Belum lagi suara imigran, dan juga suara pemilih di kantong-kantong suara Donald Trump sebagai petahana. Saya kira kemenangan Biden memang potret dari harapan demokrasi segenap rakyat Amerika,” ujar legislator dapil Sumatera Barat II ini.

Guspardi menyampaikan, kemenangan Biden yang bahkan terjadi di basis dan kantong-kantong suara Trump, patut ditengarai bahwa Pilpres AS tak terganggu oleh penetrasi kekuasaan petahana. “Ini pelajaran berharga bagi kita



Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus. Foto: Runi/OD

”

SAYA MENDUKUNG ADA UPAYA YANG LEBIH KONGKRIT MEMBANGUN KERJA SAMA DI BIDANG-BIDANG TERSEBUT, TERMASUK MENGENAI SISTEM PEMILU KITA

semua, bagi pemilih, bagi politisi, dan juga bagi penyelenggara Pemilu kita,” ulas Gusparda.

Ditegaskannya, fakta bahwa Pemilu di Indonesia masih kerap dibayangkan oleh narasi lembaga survei dan *quick count* adalah hal yang perlu dibenahi. “Pasca kemenangan Biden, ada kesadaran bersama di tanah air Indonesia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut. ■ dep/es

E-Parlemen, Bentuk Kerja Cerdas Setjen DPR

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi kehadiran e-parlemen sebagai sebuah kerja keras, kerja hebat dan kerja cerdas yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia meyakini program tersebut sebagai salah satu langkah inovasi yang bertujuan mengetengahkan *spirit* DPR RI ini menjadi parlemen modern yang mengedepankan transparansi.

“Saya mengapresiasi luar biasa kehadiran e-parlemen. Menurut saya ini merupakan kerja keras, kerja hebat dan kerja cerdas yang dilakukan oleh Setjen DPR RI. Ini merupakan salah satu inovasi yang bisa mengisi ruang dan menjaga *spirit* DPR untuk menjadi parlemen yang modern dan selalu mengedepankan transparansi,”

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.
Foto: Runi/OD

”

INI MERUPAKAN KERJA KERAS, KERJA HEBAT DAN KERJA CERDAS YANG DILAKUKAN OLEH SETJEN DPR RI

ujar Arteria usai menghadiri Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Transparansi itu dibuktikan dengan adanya bahan-bahan rapat yang langsung bisa diakses lewat telpon selular. Selain tentunya memastikan kerja-kerja DPR RI yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Dengan demikian, ia berharap hal tersebut akan membuat DPR RI semakin dipercaya masyarakat dan dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya adalah salah satu pihak yang beranggapan bahwa rakyat butuh kerja-kerja DPR. Dan melalui e-parlemen ini masyarakat bisa mengetahui kerja-kerja DPR,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengakhiri wawancara dengan **Parlementaria**. ■ ayu/sf



Pemerintah Perlu Sosialisasikan Keunggulan Padi Inpari Nutri Zinc

Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah mengembangkan varietas baru padi Inpari Nutri Zinc yang ditanam di atas lahan milik petani seluas 2.050 ha di Desa Lenggerong, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari berharap pemerintah menyosialisasikan secara masif tentang keunggulan padi biofortifikasi yang kaya nutrisi ini.

“Permasalahan *stunting* di Indonesia perlu adanya perhatian khusus. Sekitar 30 persen penduduk dunia termasuk Indonesia terutama anak-anak beresiko kekurangan gizi Zn (seng) yang sangat berguna untuk proses pertumbuhan. Padi Inpari Nutri Zinc ini adalah bagian dari upaya pemerintah melalui Kementan mengatasi masalah *stunting*,” ungkapnya di sela-sela mengikuti kunker ke Jawa Tengah, Kamis (5/11).

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini mendorong para pemangku untuk saling bersinergi dalam menyerap hasil panen padi Inpari Nutri Zinc agar petani mendapatkan harga jual yang menguntungkan. “Bila perlu pemerintah memberikan subsidi harga kepada petani padi Inpari Nutri Zinc agar tidak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengakui padi varietas Inpari Nutri Zinc yang di-*launching* pada Tahun 2019 lalu, segmen yang dituju adalah ibu hamil dan anak-anak. Dimana, Pemalang sendiri mendapat perhatian khusus dalam upaya atasi *stunting*. Tahun ini terdapat 10.000 ha program penanaman padi Inpari Nutri Zinc yang dijalankan pemerintah dan tahun 2021 rencana akan ditingkatkan menjadi 50.000 ha dengan sasaran 100 kabupaten prioritas yang prevalensi *stunting*-nya tinggi.

“Kementan bantu penyediaan sarana produksinya dan untuk penjualan tadi kami sudah diskusi dengan Bulog dan PT Pertani (Persero), mereka menyanggupi untuk menyerap hasil panennya (varietas Inpari Nutri Zinc) ini dengan *packaging*-nya sekaligus. Tentu dibelinya dengan harga yang wajar,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Pemalang Junaedi menyebut di wilayahnya terdapat 2.050 hektar padi yang ditanam varietas Inpari Nutri Zinc bantuan Kementan tahun 2020. “Pemalang termasuk wilayah penyumbang *stunting*. Untuk itu program ini menjadi upaya pemerintah untuk atasi *stunting* ini,” ujar Junaedi kepada Komisi IV DPR RI. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk memberikan stimulan kepada petani terkait kendala di harga jual, serta dapat diserap oleh Bulog. ■ oji/es



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau padi Inpari Nutri Zinc di Pemalang, Jawa Tengah. Foto: Naefuroji/OD

Komisi V Siap Perjuangkan Perlindungan Profesi IKPPNI



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Kresno/OD

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan siap segera memperjuangkan segenap usulan dan aspirasi dari Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) untuk diteruskan kepada jajaran Kementerian Perhubungan. Salah satunya mengenai kejelasan perlindungan profesi bagi Perwira Pelayaran Niaga.

Serta, tak kalah pentingnya yaitu kepastian hukum bagi para pelaut. Penegasan tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V

DPR RI dengan Ketua Umum IKPPNI Dwiyono Soeyono beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

“Penyampaian dari Ketua dan jajaran IKPPNI akan segera kami bahas lebih mendalam dan kami akan segera koordinasikan kepada *stakeholder* departemen terkait. Seluruh harapan dan penyampaian dari kawan-kawan IKPPNI akan kami tindaklanjuti saat rapat dengan Kemenhub dalam waktu dekat ini” ujar politisi F-Golkar itu.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri mengungkapkan akan segera mengusulkan kepada

”

**AKAN SEGERA
MENGUSULKAN
KEPADA KEMENHUB
AGAR SECEPATNYA
MEMPERJELAS STATUS
BAHWA IKPPNI SUDAH
SEHARUSNYA BERADA
DI BAWAH NAUNGAN
KEMENHUB SECARA
STRUKTURAL DENGAN
PENGUATAN UU**

Kemenhub agar secepatnya memperjelas status bahwa IKPPNI sudah seharusnya berada di bawah naungan Kemenhub secara struktural dengan penguatan UU. “Kami akan usulkan kepada Menhub bahwa IKPPNI seharusnya memang berada di bawah naungan Kemenhub,” tandas legislator dapil Jambi itu.

Sebelumnya, Ketua Umum IKPPNI Dwiyono Soeyono dalam pemaparannya saat RDPU tersebut mendesak induk Lembaga Kementerian yang melahirkan profesi untuk segera membuatkan UU Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Sebagaimana, telah disampaikan dalam petisi 2018.

“Hal demikian mengingat bahwa secara yuridis profesi-profesi tenaga ahli setara lainnya telah memiliki UU Perlindungan Profesi. Dimana, adalah hal yang wajar bila Perwira Pelayaran Niaga pun menuntut hak yang sama sebagai profesi tenaga ahli” papar Ketua Umum IKPPNI Dwiyono Soeyono kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. ■ pun/sf

Komisi VI Terus Awasi Proses *Holding* Pariwisata



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Naefuroji/OD

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengaku bahwa Komisi VI DPR RI terus melakukan proses pengawasan terhadap rencana pemerintah melakukan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (*holding BUMN*) bidang pariwisata. Hancurnya bisnis pariwisata dan pendukungnya membuat pemerintah mempercepat proses transformasi agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis.

Hal ini diungkapkan olehnya pada *Parlementaria* usai menghadiri pembukaan Rapat Paripurna Masa Per di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). Menurutny langkah *holding* yang diambil pemerintah harus diimplementasikan dengan azas kehati-hatian dengan menggunakan latar belakang untuk meningkatkan *product domestic bruto* (PDB), terlebih dalam masa pagebluk saat ini.

“Persoalan *holding*, kita melihat itu terkait harus dalam narasi besar bahwa BUMN ini tidak hanya sebagai korporasi yang mana cara pandangnya adalah lebih meningkatkan profit korporasi, tapi *holding-isasi* harus dikaitkan bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap pertumbuhan *product domestic bruto* kita. Bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap peningkatan investasi,” terang Aria.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong agar *holding BUMN* Pariwisata ini tidak dilakukan terburu-buru, sebab masih perlu dikaji lebih dalam. Ketika ditanya lebih dalam, ia menambahkan bahwa kajian tersebut meliputi hubungan antara *roadmap* perusahaan dengan aset besar yang mampu memberikan *leverage*, serta pasar yang harus dibidik dengan jelas.

“Jangan sampai *holding-isasi* ini hanya sekedar *ingrouping* yang tidak punya strategi terhadap pasar

pariwisata kita. Sehingga aset-aset ini tidak berubah menjadi *resources* yang produktif, tapi justru kadang *holding-isasi* menjadi sesuatu yang tidak memberikan keleluasaan di dalam BUMN-BUMN berkembang,” imbuhnya.

Aria juga mendorong agar proses *holding* juga diiringi oleh upaya restrukturisasi aset, restrukturisasi keuangan, dan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk restrukturisasi SDM, ia berharap agar karakter daripada karyawan dapat dibentuk menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan *entrepreneurship-entrepreneurship* yang memiliki cara pandang secara nasional dan global.

“Saya kira ini akan menjadi hal yang lebih produktif baik untuk korporasi maupun *agent of development* terhadap PDB. Saya kira itu yang harus dilihat, jangan terlalu miopi memandangnya. Karena kadang hanya berpikir miopi dengan aset yang sedemikian besar di BUMN pariwisata, sehingga aset itu bisa di-*leverage* dalam bentuk utang-utang baru yang sekedar untuk menutup utang lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam kesempatan berbeda mengatakan, rencana *holding BUMN* pariwisata telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Nantinya, *holding BUMN* Pariwisata akan menggabungkan sektor pariwisata, penerbangan serta sektor lainnya, seperti kawasan wisata.

Adapun perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan satu klaster adalah, PT Hotel Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II (Persero), Sarinah, Borobudur, dan perusahaan BUMN lainnya. ■ *er/sf*

Komisi VII Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 16 Calon Anggota DEN

Setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto menggelar uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2020-2025.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan memperhatikan Surat Presiden No. 40 presiden-09-2020 perihal calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2025. Serta sesuai dengan undangan dan jadwal yang telah disampaikan, pada hari ini Selasa 10 November 2020 dan Rabu 11 November, Komisi VII DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota DEN masa jabatan tahun 2020-2025,” ujar Sugeng saat membuka uji kelayakan dan kepatutan atas calon anggota DEN, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (10/11).

Setelah melalui proses seleksi, lanjut Sugeng, ada 16 calon anggota DEN yang lolos dalam proses seleksi yang telah digelar oleh Kementerian ESDM. Yakni Agus Puji Prasetyono, Taufik, Musri, Supriyadi dari kalangan akademisi. Satya Widya Yudha, Abadi Poernomo, Herman Darnel Ibrahim, Agus Pramono dari kalangan industri.

Selanjutnya Daryatmo Mardianto, Eri Purnomohadi, Dina Nurul Fitria, dan Ibrahim Hasyim dari kalangan konsumen. Andhika Prastawa, dan As Natio Lasman dari kalangan teknologi, serta Yusra Khan dan Surono dari kalangan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut, sebagian besar Anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan berbagai hal baik terkait kondisi energi nasional, serta tugas dan fungsi dari DEN itu sendiri. Termasuk berbagai pemikiran dan terobosan yang akan dilakukan jika kelak terpilih menjadi anggota DEN untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Anggota Komisi VII DPR RI Subarna misalnya yang mempertanyakan perbandingan kondisi energi nasional dengan kondisi negara lain. “Saya ingin mengetahui sumber daya manusia negara kita dengan negara lain, kemudian teknologi yang dihasilkan sejauh mana perbandingannya. Apakah kita mampu bersaing atau tidak karena tadi ada teknologi impor. Terus, berapa biaya untuk penelitian

riset yang diperlukan sehingga negara kita mampu menunjukkan sumber daya manusianya,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Subarna, dari hal ini semua yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan energi, dan harga murah yang terjangkau oleh masyarakat. Politisi Partai Gerindra ini meminta agar dijelaskan terkait ketersediaan energi dan harga terjangkau yang sesuai dengan hasil penelitian dari peserta *fit and proper test*.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika mempertanyakan terobosan atau masukan dari para calon anggota DEN untuk meningkatkan kinerja, *performance* DEN dan juga upaya agar pemenuhan energi bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

■ ayu,del/es



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Azka/OD

Revisi UU Kesejahteraan Lansia Pertegas Kewenangan Pemda Tangani Warga Berusia Senja

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Pasalnya UU ini masih belum mengatur kewenangan pemerintah daerah (pemda) secara tegas, sementara UU Otonomi Daerah sudah diperbaharui. Hal tersebut ia ungkapkan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali, (11/11). Kunjungan ini guna menyerap aspirasi untuk penyusunan RUU Kesejahteraan Lansia.

“Sangat relevan UU Kesejahteraan Lansia untuk diperbaharui dan direvisi. Kita tahu pada UU lama dibuat dengan sistem yang masih sentralistik, maka otomatis belum begitu tegas kewenangan pemerintah daerah, dan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Padahal UU Otonomi Daerah saja terus diperbaharui. Maka dalam aturan yang baru ini nantinya kita harus pertegas kewenangan pemda, senafas dengan UU pemerintahan daerah,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang proyeksi penduduk Indonesia tahun 2015-2035, persentase lansia di tahun 2020 telah mencapai 10 persen. Persentase ini akan semakin meningkat hingga 16,5 persen pada tahun 2035. Data dari Kementerian Sosial juga mencatat bahwa sebanyak 40,6 persen lansia juga masih tinggal bersama 3 generasi dan 27,3 persen tinggal bersama keluarga.

Terkait indikator usia yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1998, Ace menilai perlu adanya penyesuaian

seiring dengan perkembangan zaman. Selain usia, aturan baru juga harus mencakup peningkatan anggaran, perlindungan, akses dan fasilitas khusus bagi lansia. Dengan demikian, adanya aturan baru dapat mampu memperkuat integrasi rehabilitasi sosial dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan lansia.

“Tentu kita harus memikirkan kehadiran negara dalam mengatur kesejahteraan lansia. Dalam UU lama, yang disebut lansia itu 60 tahun. Sekarang tahun 2020 saja angka harapan hidup kita semakin tinggi, ditambah dengan nutrisi yang semakin baik dan tingkat ekonomi bertumbuh. Bahkan *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia/ IPM) saja harapan hidup meningkat jadi 70 tahun, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” imbuhnya.

Provinsi Bali dipilih menjadi tujuan kunspek ini karena sudah mewajibkan penyediaan Unit Layanan Geriatri atau poli khusus lansia pada setiap rumah sakit dan puskesmas sesuai aturan Perda Bali. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bali, Dewa Gede Mahendra Putra kepada Komisi VIII DPR RI.

“Pemprov Bali sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lansia Nomor 11 tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia, yang berisikan fokus pemerintah di bidang kesehatan, meliputi pemberian kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada lansia. Bentuk layanan kesehatan misalnya seperti di puskesmas berupa penyediaan loket lansia, penyediaan ruang khusus lansia,” kata Kepala Dinsos P3A Bali. ■ alw/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: Alfie/OD

Program Kartu Prakerja Harus Dievaluasi agar Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja



Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Jaka/OD

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang. Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya.

Untuk itu fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai. "Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," ujarnya Kurniasih kepada *Parlementaria*, baru-baru ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, pihaknya

selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini. Ia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," tuturnya.

Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.

Kurniasih mengingatkan persoalan

”

DARI HASIL EVALUASI NANTI AKAN BANYAK MASUKAN YANG DAPAT DIBERIKAN SEBAGAI PERBAIKAN ATAS PROGRAM INI

ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan. Bahkan, cenderung melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Kurniasih mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.

"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa Timur," jelasnya.

Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongan kerja di luar negeri. "Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. ■ rnm/es

E-Sport Perlu Dilindungi UU

E-sport yang kian ramai dipertandingkan membutuhkan perlindungan Undang-Undang (UU) secara jelas dan khusus. UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang ada sekarang belum menyebutnya secara khusus. Namun, *e-sport* sudah menjadi olahraga ekshibisi pada Asian Games 2018 lalu di Indonesia, dan sudah dipertandingkan pula pada SEA Games 2019 di Filipina.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan ini saat memimpin rapat Panja UU

SKN Komisi X DPR RI dengan pakar dan para pelaku *e-sport*, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). “*E-sport* masuk dalam olahraga ekshibisi Asian Games dan mendapat sambutan yang sangat positif dari publik. *E-sport* juga disetujui IOC untuk dipertandingkan dalam SEA Games 2019 di Filipina.”

Komisi X DPR RI, kata politisi Partai Golkar itu, ingin memberi perhatian dan apresiasi kepada para atlet *e-sport* di Tanah Air. Para peraih medali dalam *e-sport* kelak akan dipandang sebagai duta negara pula. “Jadi akan ada masa depan yang

baik untuk para atlet *e-sport* seperti para atlet pada umumnya,” ungkap Hetifah optimis.

Menurutnya, perkembangan *e-sport* menuntut perlindungan regulasi bagi para atletnya sekaligus mengembangkan industrinya. Perlindungan itu, misalnya soal jaminan hari tua dan bonus prestasi. Selanjutnya, Hetifah juga berharap agar di setiap provinsi dibangun infrastruktur *e-sport* bertaraf internasional.

“Undang-Undang SKN belum mengatur dan menyebutkannya secara khusus. Namun dari pengertian olahraga yang ada di SKN, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong minat serta mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial, maka kegiatan *e-sport* tercakup dalam undang-undang SKN,” jelas legislator asal Kalimantan Timur ini. ■ mh/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Foto: Jaka/OD



Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat

Indonesia resmi masuk resesi pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, hari ini (5/11). Kontraksi tersebut juga dialami pada kuartal sebelumnya, atau kuartal II 2020, mencatatkan minus 5,39 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, kondisi tersebut sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan ekonomi memang alami penurunan pada kuartal III-2020 sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19. Pelaku usaha sudah sejak lama mempersiapkan resesi ekonomi. Jadi kita lihat saja, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) positif 1,85 persen sampai sesi siang ini sehingga berada di 5.199. Nilai tukar rupiah juga menguat ke Rp 14.370 per dollar AS bukti investor tetap percaya terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia,” kata Amir melalui keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Kamis (5/11).

Menghadapi resesi, politisi Fraksi PPP menekankan bahwa untuk saat ini yang paling penting adalah seberapa cepat pemulihan ekonomi dari sisi belanja pemerintah. Data menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah cukup tinggi, yaitu 9,76 persen dibanding tahun lalu. Nilai belanja pemerintah juga besar yakni Rp 377 triliun pada kuartal ke III. “Jadi DPR RI pasti mendukung langkah percepatan pemulihan ekonomi dengan program PEN agar resesi ekonomi tidak berlanjut sampai tahun 2021,” imbuhnya.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Arief/OD

Sejauh ini pemerintah dinilai telah mempercepat realisasi PEN. Hal ini terlihat dari banyaknya program yang serapannya rendah langsung dialokasikan ke program perlindungan sosial dan penanganan kesehatan. “Komitmen ini terus kita pantau di DPR RI, khususnya anggaran bantuan sosial agar diprioritaskan untuk menahan laju kemiskinan,” kata legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut.

Tidak hanya itu, Amir menekankan pengawasan terhadap program pemulihan ekonomi untuk tetap menjadi prioritas sehingga dipastikan penyimpangan anggaran sangat kecil. Kami juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menghadapi situasi resesi. “Misalnya

ada pelaku UMKM berjualan di *platform* daring, omsetnya masih bisa terjaga. Kita perlu gerakan optimisme secara nasional. Resesi ekonomi pasti berlalu, dan ekonomi Indonesia tetap menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan negara lain,” pungkas Amir lebih lanjut.

Secara kuartalan, ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 4,19 persen dari kuartal I-2020 ke kuartal II-2020. Dua kontraksi beruntuk secara kuartal ke kuartal (Q to Q) ini bisa dibalang kondisi perekonomian sudah masuk ke fase resesi teknikal (technical recession), karena pada kuartal I-2020, secara QtQ sudah minus 2,41 persen. Secara kumulatif, selama semester I-1010 ekonomi Indonesia sudah minus 1,26 persen. ■ alw/es

Implementasi UU Cipta Kerja Diharapkan Beri Kemudahan Berusaha



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi. Foto: Jaka/OD

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan bahwa semangat dari *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin membuka usaha. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa dalam UU Cipta Kerja juga mengatur tentang pemanfaatan hutan sosial bagi masyarakat, sehingga masyarakat lokal mendapat keuntungan lebih.

Pernyataan ini disampaikan politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini saat menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). Delegasi DPRD Banyuwangi menyampaikan masalah pertambangan

yang tanpa mengantongi izin.

“Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur salah satunya mengenai masalah itu. Meskipun secara umum kaitannya dengan Undang-Undang Minerba, tapi paling tidak semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ingin memudahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan perizinan berusaha,” ungkap Baidowi di hadapan perwakilan Anggota DPRD Banyuwangi.

Awiek, sapaan akrabnya itu pun mencontohkan terkait perhutanan sosial yang di Banyuwangi masih menjadi masalah klasik. Dia menjelaskan terkait dengan warga yang memiliki hunian di dalam hutan, yang selama ini tidak jelas statusnya, dan tidak memiliki legalitas atas tanahnya. Sehingga menjadi polemik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dalam UU tersebut akan diatur secara jelas.

“Ini lahannya siapa, siapa yang mengeluarkan sertifikat, di Undang-Undang Cipta Kerja antara BPN dengan Kementerian Kehutanan duduk bareng bisa menyelesaikan masalah ini. Bahwa keterlanjuran yang sudah tinggal di hutan itu bisa mendapatkan legalitas melalui skema perhutanan sosial, dan yang sudah ditinggali itu bisa mendapat sertifikat,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan.

Sehingga, pemanfaatan hutan bagi masyarakat di lingkungan hutan yang selama ini diancam pidana itu dikecualikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. “Mudah-mudahan, pelaksanaan teknis di lapangan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita susun dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Awiek.

Tak hanya itu, DPRD Banyuwangi juga menyampaikan persoalan kewenangan terkait harmonisasi ketentuan perundang-undangan di bawah UU. Jika di UU Nomor 15 Tahun 2019, bahwa harmonisasi dilakukan oleh kementerian yang membidangkan tentang perundang-undangan, tetapi di UU Pemerintah Daerah, DPRD menginduknya kepada Mendagri. Sementara itu, antara Mendagri dengan Menkumham masih belum satu kata, yakni bagaimana mengevaluasi perda-perda yang sudah ada.

“Namun kita carikan solusi di Undang-Undang Cipta Kerja, kita atur lebih detail lagi, bahwa harmonisasi itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Sinergisitas di masing-masing lembaga di Indonesia masih menjadi persoalan, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik,” papar Awiek menutup pernyataannya. ■ eko/sf

E-Parlemen, Perwujudan Parlemen Modern

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai program e-parlemen merupakan salah satu bentuk perwujudan parlemen modern yang saat ini sedang diupayakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurutnya program e-parlemen yang dikembangkan oleh Bagian Persidangan Paripurna, Setjen DPR RI harus terus didukung hingga menjadi bentuk yang sempurna.

“Kalau menurut saya ini sangat bagus ya, apalagi ini adalah merupakan salah satu bentuk parlemen modern yang terus coba digaungkan atau kita kampanyekan. Sehingga program ini akan mendukung bagian dari upaya parlemen modern tersebut. Hal ini harus terus dikembangkan lagi, dilanjutkan ide-idenya. Terlebih banyak rapat yang *virtual* juga ya,” jelas politisi Partai Gerindra itu saat ditemui **Parlementaria**, sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai, kehadiran program e-parlemen dianggap merupakan sebuah langkah inovatif dan taktis di Kesetjengan DPR RI yang dapat membantu terwujudnya tata kelola Rapat Paripurna yang berkualitas, serta memudahkan kinerja Anggota Dewan.

“Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras, kerja hebat, kerja cerdas yang dilakukan oleh Kesetjengan DPR RI dalam rangka melakukan inovasi program e-parlemen. Ini merupakan salah satu langkah tepat dalam mendukung kegiatan kami. Selain itu juga terlihat

efisien,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

E-parlemen merupakan program pengembangan teknologi informasi dimana nantinya pimpinan dan anggota DPR RI akan mendapatkan pelayanan tersedianya data dan informasi bahan rapat paripurna secara digital yang akan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Secara umum, bentuk ini merupakan upaya meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) yang menciptakan efisiensi kerja.

Selain itu, program ini juga menjanjikan terwujudnya keterbukaan informasi publik yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

Seluruh masyarakat nantinya dapat mengakses bahan-bahan rapat persidangan paripurna dengan menggunakan *barcode* atau *share link*.

Arteria berpendapat bahwa program seperti ini dapat memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap pandangan masyarakat terkait kinerja DPR RI. “Ini memastikan kerja-kerja DPR dapat terlihat secara nyata dan transparan di mata masyarakat, sehingga ada pandangan positif yang dapat dicitrakan,” imbuhnya. ■ **er/sf**



Wakil Ketua BURT DPR RI
Novita Wijayanti. Foto: Jaka/OD



BKSAP DPR RI bekerja sama dengan Westminister Foundation for Democracy (WFD), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Bandung, Jawa Barat. Foto: Aisyah/OD

BKSAP DPR Selenggarakan FGD ‘Pentingnya Partisipasi Publik dan Akses bagi Publik Terhadap Informasi’

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Westminister Foundation for Democracy (WFD), Universitas Padjadjaran dan sejumlah Organisasi Internasional mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Meningkatkan Akses Bagi Publik Terhadap Informasi dan Partisipasi Publik dalam Peran Parlemen Khususnya Legislasi dan Pengawasan terkait Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia”.

FGD yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 9-11 November tersebut dihadiri oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali

Sera (F-PKS) dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menghadiri FGD tersebut pada sesi pembuka.

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyampaikan bahwa isu pertumbuhan hijau (green growth), akses bagi publik terhadap informasi dan partisipasi publik membutuhkan perhatian lebih jika dibandingkan dari sekian banyak isu internasional yang menjadi wilayah kerja BKSAP.

Lebih jauh, Fadli menjelaskan bahwa FGD ini merupakan kelanjutan dari sesi pertama yang diadakan di Bali. FGD ini juga merupakan kerja bagian dari peran BKSAP sebagai pelaksana Diplomasi Parlemen sesuai Undang-Undang MD3, dalam menjalin kerja sama dan kemitraan tidak hanya dengan Parlemen negara lain, tetapi juga

dengan Organisasi Internasional.

Membuka sesi pertama dari FGD, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris sebagai Ketua Panja Organisasi Internasional menambahkan bahwa diskusi terkait pandemi Covid-19 juga harus membahas mengenai upaya-upaya pemulihan pascapandemi. Salah satunya adalah dengan mengeksplorasi lebih jauh mengenai peluang untuk mewujudkan pemulihan hijau.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pertumbuhan hijau merupakan salah satu dari empat prioritas dalam kebijakan pembangunan di provinsinya. Oleh karena itu, mantan Wali Kota Bandung tersebut mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI dan berharap ke depan kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan hijau mendapatkan dukungan dari Parlemen. ■ ais/sf

Bangkitkan Kembali Daya Saing Indonesia di Mata Dunia

Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan aktivitas perekonomian Indonesia saat ini, tak terkecuali kegiatan ekspor dan impor. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, sudah saatnya Indonesia kembali membangkitkan daya saingnya di dunia.

Hal tersebut ia ungkapkan usai menjadi narasumber dalam webinar BKSAP DPR RI bertajuk 'Anggota Parlemen Sebagai Aktor Diplomasi Indonesia' yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (11/11). Menurutnya tugas parlemen saat ini adalah membantu diplomasi Indonesia agar memiliki daya saing dan nilai tawar yang cukup besar di mata negara-negara lain.

"Menarik bagi kami, khususnya parlemen yang saat ini sedang bekerja untuk membangkitkan kembali kekuatan negara Indonesia ini, bahwa sebetulnya (Indonesia) punya nilai tawar yang cukup besar di mata dunia. Maka dari itu, kita harus arahkan supaya mendapatkan *value added* bagi bangsa kita. Jangan sampai nanti kita tidak punya nilai tawar yang kuat," terangnya.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir.
Foto: Arief/OD

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini menuturkan, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan keuntungan tersendiri. Salah satunya dengan tidak memihak kepada pihak tertentu. Sebaliknya, adanya dua kekuatan ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan China bisa membuka peluang baru bagi ekonomi Indonesia.

"Dalam hal ini, kita berharap kekuatan di barat itu tetap menjadi mitra kita, selain itu juga kekuatan Tiongkok yang baru menjadi pendatang dan juga menjadi vitamin bagi Indonesia untuk memperkuat pembangunan di sisi infrastruktur. Nah

ini yang harus kita formulasikan, jangan sampai menjadi dikotomi seolah-olah Indonesia memihak ke Tiongkok. Tantangan kita bagaimana kita tetap menjadi *player* di kancah dunia," jelas Hafisz lebih lanjut.

Terkait penanganan Covid-19, Hafisz mendukung BUMN Indonesia dalam pengembangan vaksin Merah Putih. Anggota Komisi XI DPR RI itu menyadari, penemuan vaksin akan menjadi langkah baru bagi kehidupan seluruh manusia di dunia, maka itu ia berharap Indonesia dapat mengambil peranan penting dalam pengembangan vaksin Covid-19.

"Nah, bagi saya kita memiliki struktur yang cukup, kita punya Bio Farma, BUMN di bidang kesehatan yang dibangun sejak zaman Belanda. Inilah yang bisa kita majukan agar menjadi pemain besar di kancah nasional dan juga regional. Bahkan saya berharap sekali bahwa dalam hal ini pemerintah mengambil peran serta yang lebih kuat," tandas legislator dapil Sumatera Selatan I itu. ■ ann/sf



Pusdiklat DPR Harus Persiapkan *Think Tank* Usung Parlemen Modern

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendorong Bidang Evaluasi Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI untuk mempersiapkan lembaga ‘*think tank*’ dalam mengusung penerapan Parlemen Modern (E-Parliament). Sehingga ke depannya dalam segi kinerja tidak lagi *business as usual*, melainkan harus terus mengikuti perkembangan teknologi, serta perubahan zaman.

Dengan demikian, masih kata Indra, diharapkan upaya itu akan melahirkan satu *legacy* hasil kinerja yang monumental. Pemaparan tersebut disampaikan Indra saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan ‘Sosialisasi Pengembangan Pedoman Evaluasi Pelatihan’ Bidang Evaluasi Diklat Pusdiklat Setjen DPR RI, di Ruang Rapat Pansus C DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

“Kita tentu dengan berbagai sumber daya yang ada sudah harus mempersiapkan sebuah lembaga ‘*think tank*’ yang akan mengusung konsep Parlemen Modern. Maka, saya mengharapkan tidak lagi ada yang berpikir untuk bekerja secara *business as usual*. Sehingga, dalam segi kinerja harus berpikir *legacy* yang akan diwariskan di masa mendatang,” papar Indra kepada peserta sosialisasi.

Indra mengingatkan, ke depannya Pusdiklat sudah harus mempersiapkan desain-desain infrastruktur pelatihan dengan menyesuaikan era teknologi. Terlebih, di era kasus pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum melandai, membuat Pusdiklat DPR RI harus semakin memanfaatkan kemajuan

teknologi dalam meningkatkan kompetensi setiap pegawai.

Di sisi lain, Indra mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama dalam Pusdiklat DPR RI juga dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi dengan metode modern yaitu secara elektronik. Tujuannya, tutur Indra, sebagai elemen krusial untuk mengukur sejauh mana implementasi program dan kebijakan organisasi.

“Kepala Bidang Evaluasi Diklat sebentar lagi akan menjelaskan tentang pedoman *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan sebagai acuan kerja dalam menciptakan kesamaan pengertian, langkah-langkah dalam laporan *monitoring* dan evaluasi pelatihan. Tentu, dengan manajemen

yang baik maka Pusdiklat dapat berperan sebagai pusat pembentuk SDM Setjen DPR yang unggul dan kompeten dalam memberikan dukungan kinerja kepada Dewan,” harap Indra.

Turut hadir dalam ‘Sosialisasi Pengembangan Pedoman Evaluasi Pelatihan’ Bidang Evaluasi Diklat Pusdiklat Setjen DPR RI secara fisik yaitu Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Plt. Kepala Pusat (Kapus) Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI Rahmad Budiaji, dan Kepala Bidang Evaluasi Diklat Pusdiklat Setjen DPR RI Pesta Evaria Simbolon. Serta hadir secara *virtual* Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Nunu Nugraha Khuswara. ■ pun/sf



Foto bersama Sekjen DPR RI Indra Iskandar dengan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI dalam acara Evaluasi Diklat Pusdiklat Setjen DPR RI. Foto: Runi/OD



Pimpinan DPR RI menerima penyerahan IHPS beserta LHP Semester I Tahun 2020 dari Pimpinan BPK RI. Foto: Kresno/OD

BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 ke DPR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang berlangsung Senin (9/11). Berdasarkan laporan yang dibacakan Ketua BPK Agung Firman Sampurna, terungkap sebanyak 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan senilai Rp 8,97 triliun selama semester awal tahun 2020 ini.

“Jumlah tersebut meliputi 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 8,28 triliun, serta 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 692,05 miliar,” kata Firman di hadapan Anggota Dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Atas sejumlah permasalahan ketidakpatuhan tersebut, setidaknya sebanyak 4.051 senilai Rp 8,28 triliun dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,79 triliun, potensi kerugian senilai Rp

3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 3,19 triliun. “Dari permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara, daerah, atau perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp 670,50 miliar atau senilai 8 persen,” imbuh Agung.

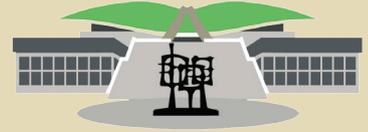
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 juga dilaporkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diantaranya bagi 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau 97 persen. Sedangkan, hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah memuat ikhtisar 541 dari total jumlah 542 Pemda. Adapun satu Pemda yang belum menyampaikan LKPD 2019 kepada BPK, atau *unaudited*, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

“BPK juga telah memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2019 diantaranya laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji, yang pada keempatnya juga telah

diberikan opini WTP. Selain itu BPK juga telah melakukan tujuh pemeriksaan kinerja, lima objek pemeriksaan pemerintah daerah dan dua objek pemeriksaan BUMN,” lanjut Ketua BPK.

Terkait pemeriksaan kinerja BUMN, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2019 dengan kesimpulan tidak efektif. Kemudian, PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017 hingga semester 1 2019 dengan kesimpulan kurang efektif.

Dalam kurun waktu 15 terakhir, BPK telah memberikan setidaknya 571.466 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa dengan nilai Rp 259,38 triliun. Secara kumulatif dari periode 2005 hingga 30 Juni 2020, hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti entitas dengan dengan penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara, daerah atau perusahaan baru mencapai Rp 111,01 triliun. ■ alw/es



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Prof Nasaruddin Umar meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Gerald/OD



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima perwakilan serikat pekerja di Ruang KK 1, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Naefuroji/OD



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ke Mapolda Sumatera Utara dalam rangka pengawasan pengamanan Pilkada serentak 2020. Foto: Andri/MAN

